

ASPIRASI KAUM NELAYAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN¹*La Janu²***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami aspirasi, kebutuhan dan keinginan kaum nelayan di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan serta melangsungkan kehidupan sosial-ekonominya sehari-hari. Informan dalam penelitian ini terdiri dari para warga komunitas nelayan yang tersebar berdasarkan wilayah dengan kerentanan kemiskinan yang relatif tinggi. penelitian ini menggunakan metode "field research" yang berintikan pada pendekatan pembangunan partisipatif (*participatory development approach*). Karena itu, proses pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui *participatory action research*, *focus group discussion* dan *in-depth interview*. Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan yang dihadapi kaum nelayan yakni keterbatasan modal dalam berusaha mengembangkan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah sehingga berpengaruh terhadap upaya peningkatan keterampilan untuk menumbuhkembangkan usaha yang ditekuni, bantuan pemerintah yang belum berlangsung secara proporsional dan profesional sehingga cenderung tidak tepat sasaran, dan penggunaan dana APBD yang belum "pro poor" sebagai manifestasi dari strategis politik ekonomi masing-masing Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: aspirasi, kaum nelayan

ABSTRACT

The objectives of this research are to understand the aspiration, needs, and fishers' willing in South Konawe the Province of Southeast Sulawesi in organizing and carrying out the daily social economic. The informants in this research consist of the fisherman community that spread on the areas by high gap of poverty. This research used the method of 'field research' were cored in participatory development approach (participatory development approach). Therefore, the process of data collection in the field was done through participatory action research, focus group discussions and in-depth interviews. The results showed some of the problems faced by fishermen that capital constraints in trying to develop the economy, low education levels and therefore contributes to improving the skills to develop businesses that occupied, government aid that has not lasted proportionally and professionally so tend not on target, and the use of budget funds are not "pro-poor" as manifestation of strategic economic policy each Local Government.

Keywords: aspiration, fisherman community

A. PENDAHULUAN

Para ahli pembangunan dari berbagai perspektif keilmuan menyarankan untuk segera melakukan upaya redefenisi, rekonstruksi dan reformasi atas *paradigma pembangunan* yang melandasi seluruh ke-

bijakan politik dan pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pasalnya, kenyataan empirik menunjukkan bahwa selama kurun waktu perkembangan teknologi mutakhir yang secara spektakuler tampak sukses gemilang dalam konteks fisik-material. Namun di balik gemerlapan-

¹Hasil Penelitian

²Staf Pendidik pada Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: lajanu@yahoo.com

yang memukau, mencuat setumpuk fenomena dehumanisasi, deforestasi dan degradasi lingkungan yang sangat memprihatinkan.

Demikian pula dalam konteks tata pemerintahan daerah, selain ketimpangan kultural dalam bentuk Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang tampak mulai mengkanker, juga telah terjadi ketimpangan struktural sebagai akibat dari penerapan UU No. 5 Tahun 1974 yang sentralistis. Upaya penegakan kerangka “*good governance*” terus dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004. Namun hingga saat ini belum tampak hasil yang maksimal.

Kabupaten Konawe Selatan sebagai bagian integral dari wilayah Republik Indonesia, sesungguhnya mempunyai peluang yang sangat potensial dan strategis untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang mampu menumbuh-kembangkan PAD-nya serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Wilayah geografis dengan segala potensinya, terbentang di sepanjang perjalanan dari wilayah Kota Kendari hingga semenanjung selatan menuju perbatasan wilayah Kabupaten Bombana.

Besar dugaan, hamparan perkebunan yang subur dan lautan yang luas serta tambang yang tersebar di beberapa desa dan kecamatan belum dapat dimanfaatkan dan dinikmati secara maksimal oleh warga masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dan sekitarnya. Tentu saja, selain karena proses pelaksanaan pembangunan belum diselenggarakan sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah (*indigenous people*), juga dapat dipastikan bahwa Aparat Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan belum familiar dengan paradigma alternatif yang berbasis komunitas (*community based*).

Padahal, upaya peletakan dasar berbagai program pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan

sosial ekonomi menjadi sangat penting bagi kemajuan Konawe Selatan ke depan, sehingga harus ditata sebagai arah pembangunan yang tidak hanya terukur dan terencana, tetapi juga harus aspiratif. Betapa tidak, strategi besar pembangunan di masa lalu yang *growth oriented* dengan melakukan *trade-off* terhadap pemerataan, pada gilirannya membuahakan budaya konglomerasi yang memiskinkan.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, aneka ragam program telah digelontorkan oleh pemerintah dalam bentuk Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Tani (KUT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), dan seterusnya. Dan bahkan hampir semua departemen mempunyai program penanggulangan kemiskinan. Namun ternyata, kemiskinan kian tampak bertambah kualitas dan kuantitasnya.

Kini, di wilayah Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan angka penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih cukup tinggi yakni 35.764 orang (BPS Konawe Selatan, 2008). Tingkat kemiskinan ini juga dapat dilihat dengan masih adanya kerentanan, ketidakberdayaan dan keterisolasian dari sebagian masyarakat Konawe Selatan. Pada gilirannya, kondisi tersebut apabila tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan antara lain: (1) tingginya beban sosial masyarakat, (2) rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, (3) rendahnya partisipasi aktif masyarakat, (4) menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan (5) menurunnya

kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan.

Karena itu, perlu dilakukan upaya rekonstruksi, reformasi dan redefinisi atas pendekatan pembangunan untuk tidak lagi melihat kemiskinan dengan menggunakan *framework of thinking* yang lama. Karena hal itu sepertinya tidak mampu lagi digunakan untuk memahami hakikat kemiskinan. Kompleksitas dimensi kemiskinan di berbagai daerah dapat saja sangat berbeda bahkan pada tingkat rumah tangga maupun individu, sehingga dalam upaya mengetahui akar terjadinya kemiskinan harus dilihat berdasarkan aspirasi komunitas miskin itu sendiri. Atas dasar inilah, maka usulan studi aspiratif dikembangkan dalam upaya perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Konawe Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Informasi dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari setiap warga komunitas miskin yang berada di Kabupaten Konawe Selatan khususnya kaum nelayan. Dalam upaya mengumpulkan data di lapangan, maka semua pihak yang dinilai layak memberikan informasi dapat dijadikan sumber data. Namun untuk memperoleh hasil yang diinginkan, penelitian ini menggunakan metode *'field research'* yang berintikan pada pendekatan pembangunan partisipatif (*participatory development approach*). Karena itu, proses pengumpulan bahan di lapangan dilakukan melalui *participatory action research*, *focus group discussion* dan *in-depth interview*. Namun dalam proses penjajagan partisipatif ini, maka masyarakat daerah (*indigenous people*), elite dan kelas menengah bersama peneliti, secara bersama melakukan kajian atas berbagai kasus kemiskinan dan penyebabnya yang terjadi dan dirasakan oleh warga komunitas setempat.

Setelah seluruh data dikumpulkan baik berupa data primer maupun data sekunder, maka data diolah dan selanjutnya

dianalisis sesuai dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan rasionalitas pada kemampuan logik. Pada dasarnya, dengan berpegang pada prinsip-prinsip kualitatif, maka proses pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian berlangsung, sebab pada saat pengumpulan data secara tidak langsung juga telah terjadi suatu proses analisis data. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh di lapangan lebih mudah dianalisis dan *diinterpretatif understanding*, yaitu melakukan penafsiran atau memberi makna terhadap data atau fakta yang dikumpulkan, dan analisis data didasarkan pada pendekatan kualitatif atau tipe penelitian yang bersifat deskriptif.

Selanjutnya data yang ada disederhanakan dan dikelompokkan secara sistematis, agar data atau informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian.

C. POTRET KEHIDUPAN NELAYAN

Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam keras yang selalu diliputi ketidakpastian (*uncertainty*) dalam menjalankan usahanya. Musim paceklik yang senantiasa hadir setiap tahun dan lamanya pun tidak dapat dipastikan, sehingga kian membuat komunitas nelayan terus berada dalam suasana lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*) dengan berbagai problematikanya.

Karena itu, adalah sangat penting bagi komunitas nelayan untuk merubah cara berpikirnya, terutama mengenai kemampuan dalam mengelola keuangan yang harus disesuaikan dengan kondisi normal dan paceklik. selain itu, mereka harus cerdas mencari alternatif aktivitas di saat kondisi cuaca tidak menentu. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketika musim paceklik

hadir, maka berbagai strategi adaptif yang dilakukan oleh komunitas nelayan untuk tampil bertahan hidup. Strategi adaptif yang biasanya dilakukan adalah memobilisasi peran perempuan (kaum istri) dan anak-anaknya untuk mencari nafkah (<http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9076-307591752490238>).

Kaum perempuan biasanya terlibat penuh dalam kegiatan pranata-pranata sosial ekonomi yang mereka bentuk, seperti arisan, kegiatan pengajian berdimensi kepentingan ekonomi, simpan pinjam, dan jaringan sosial yang bisa mereka manfaatkan untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga. Hadirnya pranata-pranata tersebut merupakan strategi adaptif masyarakat nelayan dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Strategi adaptasi diartikan sebagai pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial-budaya, ekonomi dan ekologi di tempat mereka menyelenggarakan serta melangsungkan kehidupannya.

Dalam konteks ini, peran kaum perempuan nelayan tidak lagi berada pada ranah domestik (rumah tangga) tetapi telah memasuki ranah publik (masyarakat luas). Dalam beberapa kasus di Desa Bungin Permai, untuk menambah penghasilan keluarga, para kaum perempuan nelayan bahkan terpaksa menitipkan anak mereka yang masih kecil untuk dirawat kepada anaknya yang lebih tua atau tetangga yang tidak bekerja. Sedangkan strategi adaptasi yang dilakukan para nelayan (kaum suami) adalah diversifikasi pekerjaan untuk memperoleh sumber penghasilan baru seperti menjadi tukang ojek laut (*papalemba*) dan bertukang.

Nelayan di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya manusianya masih rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapan pun juga sangat rendah. Tingkat pen-

didikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi yang dapat dihasilkan oleh para nelayan, dalam hal ini teknologi di bidang penangkapan dan pengawetan ikan. Ikan yang cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain disebabkan oleh bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan, sehingga diperlukan teknologi pengawetan ikan yang baik. Selama ini, nelayan hanya menggunakan cara yang tradisional untuk mengawetkan ikan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan nelayan terhadap teknologi. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.

1. Etos Kerja Kaum Nelayan

Dapat dibayangkan bahwa nelayan sebagai usaha mata pencaharian adalah setiap saat harus melintasi samudera lautan dengan tiupan angin yang kencang serta gelombang ombak yang besar, terutama pada musim Barat. Hal ini, tentu saja semakin menambah resiko ketika harus menangkap ikan di tengah samudera lautan dalam.

Dengan demikian, berarti warga komunitas nelayan memiliki etos kerja yang tinggi, karena pekerjaan menangkap ikan hanya bisa berlangsung, jika pelakunya berani atau bersedia menanggung segala resiko yang sewaktu-waktu mungkin terjadi. Meskipun masih tampak diwarnai dengan etika subsisten sehubungan dengan lingkaran kemiskinan yang masih terus melilitnya. Kaum nelayan menyadari sepenuhnya bahwa yang menjadi orientasi dan motivasi utama dalam menekuni usaha menangkap ikan adalah sekedar berupaya mempertahankan kebutuhan ekonomi rumah tangganya.

Hanya saja, stereotipe semisal boros dan malas oleh berbagai pihak sering dianggap menjadi penyebab kemiskinan nela-

yan. Padahal kultur nelayan jika dicermati justru memiliki etos kerja yang handal. Bayangkan mereka pergi subuh pulang siang dan bahkan ada yang pergi malam kemudian menyempatkan waktunya pada waktu senggang untuk memperbaiki alat tangkap. Memang diakui bahwa ada sebagian nelayan yang mempunyai kebiasaan dan budaya boros.

2. Peralatan dan Pemasaran Hasil

Dalam proses menyelenggarakan serta melangsungkan kehidupan sosial ekonominya, selama ini komunitas nelayan di Kecamatan Tinanggea mengembangkan usaha penangkapan ikan secara tradisional dengan menggunakan alat-alat penangkapan ikan secara konvensional seperti perahu, pancing, pukut, dan tasi.

Karena itu, menurutnya bahwa untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, sangat dibutuhkan alat penangkapan ikan yang mereka sebut *tagaru* (jaring), *bagan*, *karamba* dan *gae* yang ketiganya dapat digunakan pada semua musim. Jika alat-alat tersebut berhasil dimiliki, maka bukan hanya memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Akan tetapi, juga sudah bisa bersaing dengan kehadiran nelayan migran lain dari luar daerah pada setiap musim ikan datang beroperasi di pesisir pantai Kabupaten Konawe dengan menggunakan *gae* beserta kapal yang berkapasitas 10 ton.

Menurut nelayan setempat bahwa salah satu cara yang paling strategis untuk mengantisipasi keleluasaan nelayan migran, adalah perlunya diadakan sebuah alat penangkapan ikan yang disebut "*rompong*". Karena, selain alat ini dapat berfungsi untuk memancing kedatangan ikan besar untuk berkumpul di sekeliling romping, juga menjadi umpan untuk mengundang kehadiran ikan-ikan besar untuk datang memakan ikan-ikan kecil itu di sekitar romping itu. Dan yang lebih penting lagi, rompong ini dapat mencegah kehadiran nelayan lain

untuk menangkap ikan di sekitarnya. Karena keberadaannya merupakan wilayah teritorial yang tidak boleh dimasuki oleh nelayan lain, terutama dari kalangan nelayan migran dimaksud.

Tingkat produksi nelayan memang sangat ditentukan etos kerja dan peralatan penangkapan ikan yang digunakan. Kedua faktor inilah yang sangat menentukan tingkat produktivitas penangkapan ikan. Sebab, meskipun sudah memiliki peralatan penangkapan ikan yang tergolong maju atau moderen. Akan tetapi, jika tidak ditunjang oleh etos kerja yang tinggi untuk melintasi samudera lautan yang dalam dengan kesiapan menanggung segala konsekuensi logisnya. Maka, tidak mungkin mereka dapat memajukan usahanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya sehari-hari yang kini tampak semakin terasa sulit.

Daerah pesisir di Tinanggea umumnya tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran. Kondisi ini yang selalu mengakibatkan nelayan untung sedikit, keterbatasan infrastruktur menjadikan nelayan merugi, tidak seimbang antara biaya yang dikeluarkan untuk melaut dengan keuntungan hasil jual, karena harga dipermainkan oleh pihak tengkulak.

Di sisi lain rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, berdampak sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup, upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pemilikan lebih dari satu jenis alat tangkap, agar bisa menangkap sepanjang musim, mengembangkan diversifikasi usaha berbasis bahan baku perikanan atau hasil budidaya perairan, seperti rumput laut jenis agar-agar yang kini digeluti oleh mayoritas nelayan sekabupaten Konawe Selatan.

Namun yang menjadi masalah adalah tidak semua nelayan memiliki perahu

sendiri. Nelayan yang tidak mempunyai modal untuk membeli perahu, terpaksa meminjam uang kepada para tengkulak lokal dari Tinanggea sendiri. Pada umumnya para tengkulak (*patron*) memberikan pinjaman kalau hasil tangkapan nelayan (*clien*) minim atau “nombok”. Ketergantungan nelayan pada tengkulak berawal dari utang/-pinjaman, dan biasanya dilakukan pada saat pakeklik dan atau saat mengadakan atau memperbaiki kerusakan alat tangkap. Meskipun demikian, ada juga pihak yang menilai bahwa keberadaan para tengkulak tersebut justru menolong nelayan. Kondisi ini terjadi karena pemerintah tidak mampu memberikan pinjaman lunak, dan walaupun ada bank, mereka juga tidak bisa mengaksesnya karena alat tangkap sebagai faktor produksi tidak bisa jadi agunan.

Namun berdasarkan pandangan nelayan setempat (perspektif *emic*), kuatnya pola *patron-klien* di masyarakat nelayan disebabkan oleh kegiatan perikanan yang penuh resiko dan ketidakpastian sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka selain bergantung pada pemilik modal (*patron*). Dari hal tersebut, bisa dibayangkan apa yang akan diterima para nelayan dengan sistem yang demikian, sehingga sangatlah wajar jika kemiskinan menjadi bagian yang akrab dalam kehidupan mereka.

Pada gilirannya, warga komunitas nelayan memilih menekuni budidaya rumput laut, karena telah dirasakan hasilnya. Hal ini diakui oleh semua responden yang menanam rumput laut bahwa sebelum menanam rumput laut kehidupan masyarakat di bawah standar sosial ekonomi. Akan tetapi setelah masyarakat menanam rumput laut, maka tingkat sosial ekonominya mulai meningkat. Hal ini dapat dilihat atau diukur dari kebutuhan alat-alat yang digunakan rumah tangga berupa generator, rumah-rumah mereka yang beratapkan seng dan lain sebagainya.

Betapa tidak, hanya dengan bermo-

dalakan tali nilon sepanjang 50 meter dan bibit sebanyak dua dos. Maka, usaha penanaman rumput laut sudah bisa dimulai dengan cara mengikat bibit agar-agar dan membentangkan serta pelampung. Setelah semuanya disiapkan, maka bibit tersebut diangkut ke perahu untuk dibawa turun ke laut untuk dibentangkan di areal penanaman atau lokasi masing-masing selama 30 hari sebagai masa pembibitan. Sedangkan jika mereka membiarkan sampai 40 hari, berarti siap panen sekali dalam satu bulan.

D. ISAK TANGIS KAUM NELAYAN

Hidup nelayan penuh dengan ketidakpastian. Salah satunya dialami komunitas nelayan yang bermukim di Desa Bungin Permai, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Mereka bertarung dengan arus dan ombak besar dengan bermodalkan kapal (*katinting*) apa adanya. Tapi, hasil tangkapan pun kadang tidak sesuai dengan harapan, bahkan tidak sesuai dengan modal (tenaga dan solar) yang dikeluarkan.

Tidak ada jaminan nelayan dapat mengantongi uang lebih, walau dalam kondisi cuaca sangat baik. Pendapatan yang mereka terima tetap begitu juga. Ekonomi morat-marit, tempat tinggal kumuh, sarana kesehatan dan pendidikan sulit dijangkau. Apalagi air bersih yang telah lama mereka dambakan, juga tak kunjung datang, meski sudah ada beberapa pihak yang mencoba menggali air dengan menggunakan bor hingga kedalaman 50-an meter dan mencoba menerapkan teknologi yang bisa mengolah air laut menjadi air tawar, toh tetap saja hasilnya nihil.

Pemerintah daerah belum juga membangun fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI) meski dalam ukuran kecil-kecilan di muara sungai, menambah sesak hati mereka. Akhirnya tetap saja nelayan terpuruk, sehingga kadang para nelayan harus rela membawa pulang seluruh hasil tangkapannya. Padahal, waktu menangkapnya dia rela bertarung nyawa, karena gelombang besar yang dihadapi. Ketika cuaca bersahabat,

pun tidak menjamin hasil tangkapan mereka bisa mendapatkan harga jual yang lumayan. Begitu juga sebaliknya, mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan. Nelayan di sana minta kepada pemerintah agar menolong peningkatan perolehan harga jual tangkapan yang lumayan.

"Bayangkan, kami banting tulang siang dan malam bertarung menghadapi dingin dan gelombang laut yang kadang mengerikan, tapi tiap bulan hanya meraih penghasilan yang tidak mencukupi, kata para nelayan". Problem berikutnya adalah kesulitan nelayan mendapatkan modal usaha karena ketiadaan barang yang dijadikan sebagai agunan kredit. Hal ini dimaklumi sebab nelayan umumnya tidak memiliki tanah atau benda berharga lain yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga bank tidak rela mengucurkan kredit kepadanya.

Dapat dimaklumi karena dalam dunia perbankan, agunan adalah wajib hukumnya dalam urusan perkreditan. Ini sangat berbeda dengan kaum rentenir yang mengedepankan prinsip saling percaya. Tak mengherankan, sekalipun suku bunga kredit yang diberlakukan sebesar 10 persen per hari, tetap saja dikejar rakyat kecil, seperti halnya nelayan. Persyaratan kredit modal usaha yang begitu ketat dari perbankan ataupun para tengkulak membuat kehidupan sebagian besar nelayan jalan di tempat. Bagi mereka, untuk bisa memiliki perahu sendiri, walaupun hanya dengan mesin 10 PK seharga sekitar Rp 5 hingga 8 juta per unit, merupakan mimpi panjang yang tak berujung, apalagi pihak pemilik modal kadang membatasi jumlah uang yang dikreditkan maksimal Rp.5.000.000,-.

Di antara para pemilik perahu (katinting) di Desa Bungin Permai, hanya beberapa orang saja yang perahunya berkapasitas 10 - 24 PK. Perahu tersebut umumnya dioperasikan sendiri nelayan yang bersangkutan dengan dibantu satu atau dua orang sanak keluarganya. Pengadaan perahu

kecil itu umumnya melalui kredit dari para tengkulak. Meskipun pengembalian atau cicilan kredit tidak terlalu ketat, tetap saja terasa berat untuk ukuran nelayan tradisional, sebab hanya sebagian kecil pendapatan yang digunakan untuk kepentingan ekonomi keluarga. Kondisi itu harus mereka jalani sekitar setahun, baru utang itu lunas.

Secara komparatif, kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Tinanggea dapat dibandingkan dengan lesunya keadaan perekonomian desa-desa di pesisir pantai Kecamatan Laonti pada saat musim Barat. Pada musim ini angin bertiup sangat kencang serta alunan ombak yang bergelombang besar, sehingga nelayan lebih banyak tinggal di rumahnya. Kalau pada musim Timur atau musim ikan tiba, maka pendapatan nelayan atau roda sosial perekonomian komunitas nelayan kembali bergerak dan sedikit membaik. Namun sebaliknya, maka keadaan perekonomian desa-desa pesisir pantai menjadi lesu.

Dalam kondisi lesu itulah tim peneliti hadir di wilayah pesisir pantai Kecamatan Laonti, sehingga informasi yang pertama kali diperoleh dari Kepala Desa dan warga masyarakat Desa Ulu Sawa sebagai wilayah penelitian yang mula-mula didatangi, adalah ungkapan suka dan duka perekonomian nelayan yang dialami dan dirasakan, betapa pedasnya ketika suasana dalam keadaan bukan musim ikan.

Sesungguhnya, ikhwal suka duka sosial ekonomi nelayan yang terjadi pada setiap saat musim Barat tiba, merupakan hal biasa bagi warga komunitas nelayan setempat. Karena dari sekitar 75 persen yang menekuni nelayan sebagai usaha mata pencaharian utama, terdapat 25 persen di antaranya yang bergerak mencari tambahan penghasilan dengan menekuni usaha di bidang perkebunan. Sehingga, masih ada semangat dan harapan yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan primer rumah tangga sehari-hari melalui tanaman

jangka pendek dan jangka panjang yang telah ditanam pada setiap saat tidak turun ke laut.

Namun selama kurun waktu krisis ekonomi berlangsung dengan meningkatnya harga BBM dan berbagai jenis kebutuhan lainnya. Maka, kedua jenis pendapatan terutama dari mereka yang bermata pencaharian ganda, seolah tidak berarti sebagaimana di masa-masa sebelum terjadinya krisis multidimensional yang tak berujung pangkal itu. Tentu saja bisa dibayangkan dan sekaligus bisa dirasakan, akan betapa pedisnya kehidupan mereka. Karena untuk turun ke laut, mereka diperhadapkan dengan pertimbangan harga bahan bakar yang sangat tidak seimbang dengan hasil tangkapan, sehingga nelayan mengambil keputusan untuk tinggal di rumah.

Karena itu, keengganan turun melaut untuk menangkap ikan pada musim angin kencang dan ombak besar, lebih dominan dihantui oleh mahalnya harga bahan bakar, ketimbang resiko kecelakaan yang kemungkinan bisa terjadi pada musim Barat. Para responden mengakui bahwa melaut pada musim Barat tersebut, adalah sama saja terus menambah utang kepada kaum penadah yang menjadi pelanggan atau tengkulak yang membeli hasil-hasil tangkapannya. Namun untuk sekedar mencari ikan untuk dikonsumsi oleh anggota rumah tangganya sehari-hari, maka mereka menggunakan perahu kecil (*sampan*) dengan berdayun menyusuri pinggir-pinggir lautan. Jika ada lebihnya, maka biasa juga dijual kepada para "*papalele*" setempat.

Memang pada musim Timur sebagai kategori musim ikan di Kecamatan Laonti, roda perekonomian nelayan kembali bergerak dan berputar. Namun ternyata keluhan mereka tidak serta merta berhenti, karena pada musim ikan dimaksud masih diperhadapkan dengan kehadiran nelayan migran yang datang tepat pada musim ikan tersebut. Tampaknya, mereka mengeluh karena

tidak mampu bersaing dengan kemampuan dan peralatan penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan migran yang datang dari Sulawesi Selatan ini. Akibatnya, nelayan di pesisir pantai Kecamatan Laonti hanya dominan bisa menangkap jenis ikan yang tidak tergolong sebagai ikan nomor wahid. Sementara ikan-ikan yang masuk sebagai jenis ikan yang bisa diekspor, ditangkap secara besar-besaran oleh nelayan migran yang berasal dari Sulsel itu. Dengan demikian, berarti pemerintah harus turun tangan untuk segera menangani masalah kehidupan sosial ekonomi nelayan.

Upaya memecahkan masalah kemiskinan komunitas di kepulauan terpencil membutuhkan investasi yang besar, baik berupa dana maupun "*man-power*". Pasalnya, keterasingan yang dihadapi oleh komunitas tersebut tidak hanya bersifat keterasingan fisik, tetapi juga meliputi keterasingan atau keterpencilan ekonomi, politik dan sosio-kultural (termasuk pelayanan).

Beberapa pedoman yang mungkin dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan keterasingan komunitas di pesisir pantai dan terutama kepulauan terpencil. Pertama, perlu diciptakan sebuah sistem perhubungan laut yang efektif dapat melayani perhubungan antar pulau secara reguler dapat menghilangkan berbagai isolasi yang dialami warga komunitas daerah terpencil, termasuk dapat membuka terbatasnya jalur komunikasi dengan masyarakat dari pihak luar yang dapat membawa perubahan.

Kedua, pemerintah, khususnya Depdagri haruslah memberikan suatu paket insentif menarik buat pegawai yang berkarya di daerah terpencil dalam bentuk gaji menarik, fasilitas asrama bagi anak-anak pegawai yang berkarya di daerah terpencil serta kemudahan untuk kenaikan pangkat, dan hak cuti dengan biaya negara bagi pegawai negeri dan keluarganya. Semua ini dimaksudkan untuk memberi memotivasi bagi pe-

gawai negeri yang berkarya di daerah terpencil. Besar harapan, kiranya pemerintah sesegera mungkin memberlakukan pointer-pointer undang-undang guru khususnya yang terkait langsung dengan hak-hak guru yang berkarya di daerah terpencil.

Ketiga, pemerintah, melalui dinas terkait (Depsos) masih harus lebih meningkatkan kesejahteraan pengembangan Komunitas Adat Terpencil (KAT) berupa proyek Pemibinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PKSMT) yang selama ini dilakukan sehingga dapat dinikmati oleh KAT pada umumnya dan komunitas Bajo pada khususnya.

Beberapa upaya pemberdayaan sosial-ekonomi komunitas nelayan di Desa Cempedak untuk menciptakan kehidupan masa depan lebih baik adalah mengefektifkan kembali berbagai program yang pernah digulirkan atau dicanangkan pemerintah sebelumnya yang dianggap macet (gagal) seperti pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pengadaan Koperasi Nelayan, Pemberian Bantuan Kredit Bergulir, Program IDT, bantuan perahu bermotor atau mesin perahu berupa motorisasi dan sejenisnya.

Meskipun upaya-upaya tersebut selama ini dianggap gagal, namun belum ada evaluasi secara komprehensif perihal penyebab kegagalan itu. Apakah karena karakteristik budaya komunitas nelayan yang menurut pandangan etik (*etic view*) dari berbagai pihak sebagai komunitas yang tidak bisa maju atau “sulit diatur”, terjadinya penyalahgunaan oleh mediator sehingga tidak secara utuh diterima oleh nelayan, serta perlunya diupayakan alternatif metode pelaksanaan yang lebih efektif. Menurut hemat penulis, ketidakberhasilan program tersebut selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya manajemen khususnya *controlling* oleh pihak pemerintah.

E. PENUTUP

Hasil studi ini merupakan strategi penanganan masalah (*coping strategies*) Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang di dalamnya mengandung hasil rekaman dan identifikasi atas berbagai aspirasi, kebutuhan dan keinginan warga komunitas nelayan di Kabupaten Konawe Selatan dalam menyelenggarakan serta melangsungkan kehidupan sosialnya sehari-hari.

Di antara permasalahan yang dihadapi kaum nelayan adalah (1) keterbatasan modal dalam berusaha mengembangkan ekonomi, Padahal, sesungguhnya warga masyarakat cukup antusias untuk mengembangkan usaha yang ditekuni selama ini. Akhirnya hasil-hasil usaha yang dicapai hanya sekedar untuk dikonsumsi sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan anggota rumah tangga. (2) rendahnya tingkat pendidikan sehingga berpengaruh terhadap upaya peningkatan keterampilan untuk menumbuhkan-kembangkan usaha yang ditekuni. (3) Bantuan pemerintah yang belum berlangsung secara proporsional dan profesional sehingga cenderung tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pranata sosial dan kelembagaan yang terorganisir secara profesional dari sekelompok relawan yang terpilih secara representatif, transparan dan demokratis, selain itu belum adanya upaya pendampingan secara maksimal dari kalangan aktivis dan relawan-relawan penanggulangan kemiskinan yang energik dan ikhlas berjibaku dengan masalah-masalah sosial-ekonomi. (4) penggunaan dana APBD yang belum “*pro poor*” sebagai manifestasi dari strategis politik ekonomi masing-masing Pemerintah Daerah, metode Musrembang dari tingkat bawah hingga ke tingkat atas yang selama ini mulai dilakukan, selain cenderung berlangsung secara formalistis, juga peserta yang diundang dan hadir belum diakui representatif dan belum terpecaya sepenuhnya oleh warga masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrum, Syamsul, 1995. Pembangunan dan Keterbelakangan (Suatu Studi Kemiskinan Tentang Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Strategi Survival Kaum Miskin Dalam Menyikapi Kemiskinannya di Wilayah Hinterland Kodya Batam, Tesis S2, UGM, Yogyakarta.
- Bappenas R.I. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2005-2009*. Bappenas, Jakarta.
- Chambers, Robert. 1983. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. LP3ES, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES, Jakarta.
- Milles, B. Matthew dan Huberman, Michael, A., *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Terjemahan, UI-Press, Jakarta.
- Mubyarto. 1995. *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Ilmu Pemerintahan Jilid I, II, III dan IV*, Program Magister Ilmu-ilmu Sosial (PM IIS) Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan (IP) Kerjasama IIP-UNPAD, Jakarta.
- PSKAMP-UNHAS. 2002. *Participatory Local Social Development (PLSD): Konsep dan Kerangka Pembangunan Sosial Lokal Partisipatoris*. Kerjasama PSKMP-UNHAS dengan JICA, Makassar.
- Rijanta, R, Dkk (Ed.) Geografi Perdesaan, Sebuah Antologi, Program Studi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi, UGM, Yogyakarta.
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Soetrisno, Loekman, *Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Prospektif Volume 5 Nomor 4, Kajian Masalah-Masalah Nasional dan Internasional.
- Steward, H. Julian. 1950. *Area Research, Theory and Practice*. Social Science Research Council, Park Avenue, New York.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama, Bandung.
- Trijono, Lambang, *Pasca Revolusi Hijau di Pedesaan Jawa Timur*, Prisma 3 Maret Jakarta.
- Wahono, Prancis, 1994. *Dinamika Ekonomi Sosial Desa Sesudah 25 Tahun Revolusi Hijau*, Prisma 3 Maret 1994, Jakarta.
- Yerimias T. Kaban, *Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur*, Prisma No. 10 - 1995, LP3ES, Jakarta